

Katalog : 7203005.51

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2013-2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

*STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI BALI 2013-2017*





STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2013-2017

ISSN : 2477-7773

No. Publikasi : 51540.1808

Katalog : 7203005.51

Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm

Jumlah Halaman : xii + 50 halaman

Naskah : Bidang Statistik Distribusi

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi

Disain Kover : Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Bali

Dicetak Oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



Tim Penyusun

**Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Bali 2013-2017**

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Adi Nugroho, M.M.

Penanggung Jawab Teknis:

I Gede Nyoman Subadri, SE.

Koordinator:

I Made Putra Astawa, SE.

Anggota:

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

Layout:

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.



<https://bali.bps.go.id>





KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), pilar kelima berupa menghasilkan pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali kembali menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2013 – 2017. Ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali selama tahun 2013 – 2017 juga disertakan di dalamnya. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Bali

Ir. Adi Nugroho, M.M.





<https://bali.bps.go.id>



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
II. METODOLOGI	
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi.....	5
III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2013 – 2017	
3.1 Gambaran Umum	17
3.2 Pendapatan Daerah.....	21
3.3 Belanja Daerah	25
LAMPIRAN TABEL	29





<https://bali.bps.go.id>





DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.....	17
Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2017 (triliun rupiah).....	18
Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen).....	19
Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen).....	20
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen).....	21
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen).....	22
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.....	23
Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen).....	24
Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 –	25





	2017 (persen)	
Gambar 10.	Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen)	26
Gambar 11.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen)	27
Gambar 12.	Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2013 – 2017 (persen)	28

<https://bali.bps.go.id>





DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2013 – 2017 (000 Rp)	31
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2013 – 2017 (000 Rp)	32
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2013 – 2017 (000 Rp)	33
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2013 – 2017 (000 Rp)	34
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2013 – 2017 (000 Rp)	35
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2013 – 2017 (000 Rp)	36
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2013 – 2017 (000 Rp)	37
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2013 – 2017 (000 Rp)	38
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2013 – 2017 (000 Rp)	39
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2013 – 2017 (000 Rp)	40
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2013 – 2017 (000 Rp)	41
Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	42





	(APBD) Kabupaten Badung, 2013 – 2017 (000 Rp)	
Tabel 13.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2013 – 2017 (000 Rp)	43
Tabel 14.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2013 – 2017 (000 Rp)	44
Tabel 15.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2013 – 2017 (000 Rp)	45
Tabel 16.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2013 – 2017 (000 Rp)	46
Tabel 17.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2013 – 2017 (000 Rp)	47
Tabel 18.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2013 – 2017 (000 Rp)	48
Tabel 19.	Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2013 – 2017 (000 Rp)	49
Tabel 20.	Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2013 – 2017 (000 Rp)..	50





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini didasari asumsi bahwa Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas





perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat ke mana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran mengenai anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2013 – 2017 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2013 – 2017.





1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017, yaitu untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2013 – 2017 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017.
4. Lampiran Tabel-tabel.





II. METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017. Kabupaten/Kota yang dicakup meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara, data yang dicakup merupakan data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengkompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kantor Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Bali yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah masing-masing melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

2.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

❖ Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah





❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

❖ **Pajak Daerah**

Pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

❖ **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.





❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.

❖ **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

➤ **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

➤ **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.





❖ **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

❖ **Belanja Daerah**

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran



yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

❖ **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Belanja pegawai (tak langsung) didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

❖ **Belanja Bunga**

Belanja bunga didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.





❖ **Belanja Hibah**

Belanja hibah didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.





❖ **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tak terduga didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

❖ **Belanja Langsung**

Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Belanja pegawai (langsung) didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

❖ **Belanja Modal**

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon,





bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.





❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

❖ **Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**

Penerimaan kembali investasi dana bergulir didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi danayang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito





berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran pokok utang didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.

❖ **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

<https://bali.bps.go.id>



Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan Pemerintah Daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

❖ **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

❖ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)

❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir(2004:48). Rasio efektivitas PAD





dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

❖ **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh,dkk: 2011).

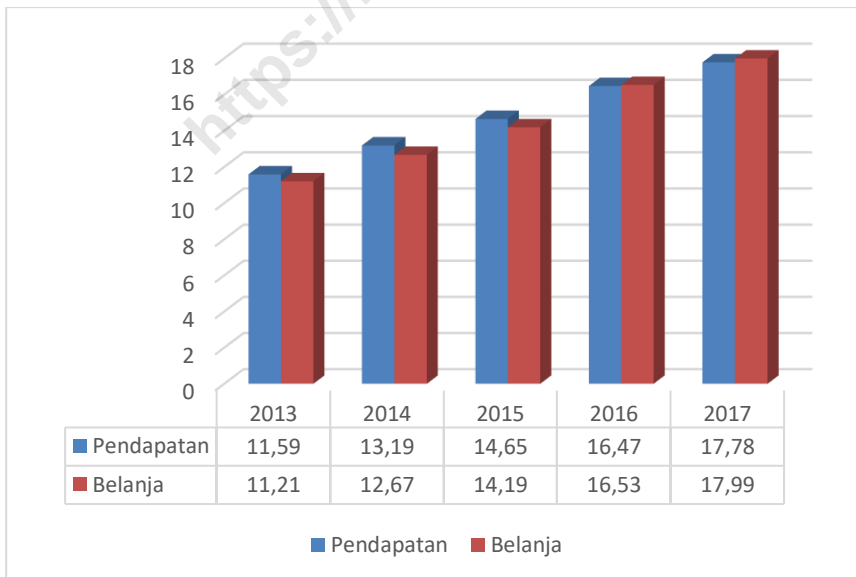




III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017

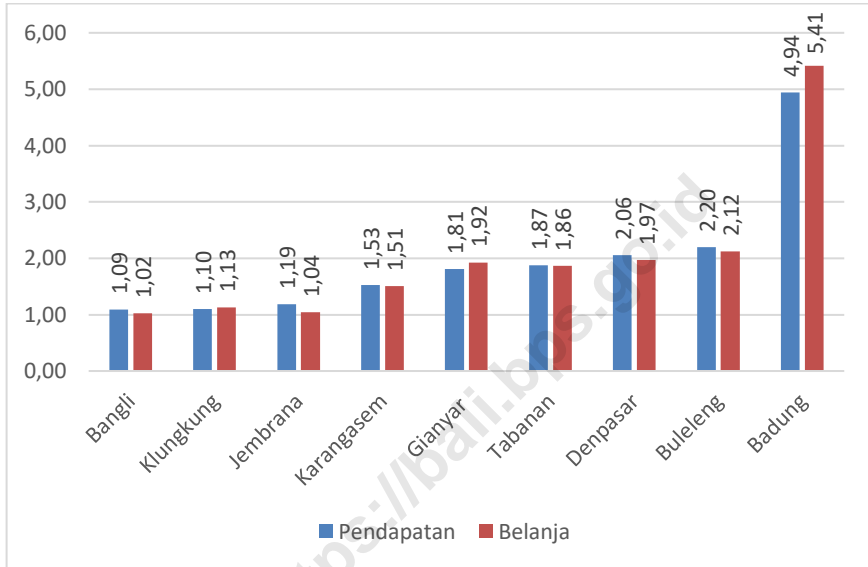
3.1 Gambaran Umum

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2013 – 2017 dari seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat adanya trend kenaikan pendapatan maupun belanja daerah (gambar 1). Jumlah pendapatan Pemerintah Daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 11,59 triliun rupiah di tahun 2013 kemudian menjadi 17,78 triliun rupiah pada tahun 2017, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 53,41 persen atau tumbuh rata – rata 13,35 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2013 – 2017, belanja daerah tumbuh dari 11,21 triliun pada tahun 2013 menjadi 17,99 triliun di tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 60,48 persen atau naik rata - rata 15,12 persen per tahun.



Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2013 – 2017 (Triliun Rupiah)



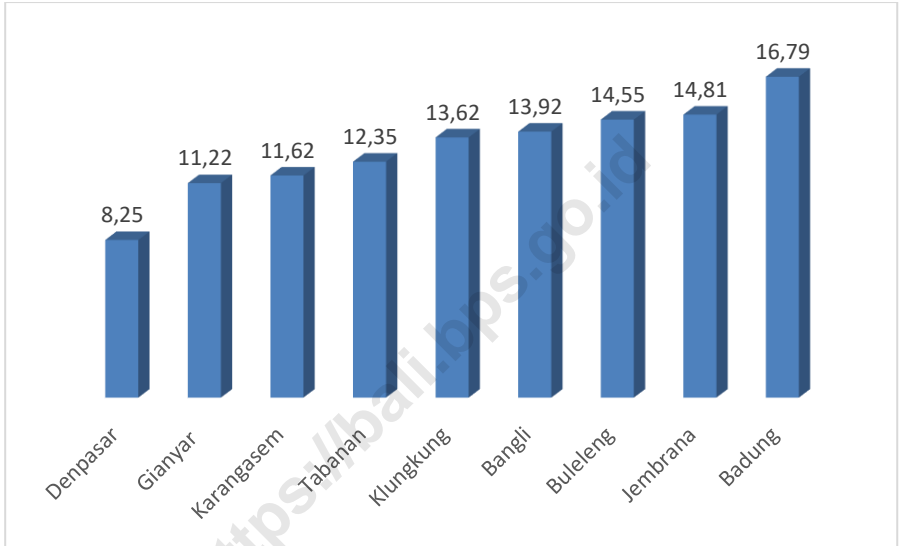


Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2017 (triliun rupiah)

Berdasarkan realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017 (gambar 2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung masih memiliki pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2017 mencapai 4,94 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 5,41 triliun rupiah. Selanjutnya disusul Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar yang mencapai penerimaan APBD masing-masing sebesar 2,20 triliun rupiah dan 2,06 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 2,12 triliun rupiah dan 1,97 triliun rupiah. Kabupaten yang memiliki capaian realisasi APBD tahun 2017 paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan nilai penerimaan APBD sebesar 1,09 triliun rupiah dan belanja daerah 1,02 triliun rupiah, disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Jembrana dengan capaian realisasi penerimaan APBD tahun 2017 masing-masing sebesar 1,10 triliun rupiah dan 1,19 triliun rupiah



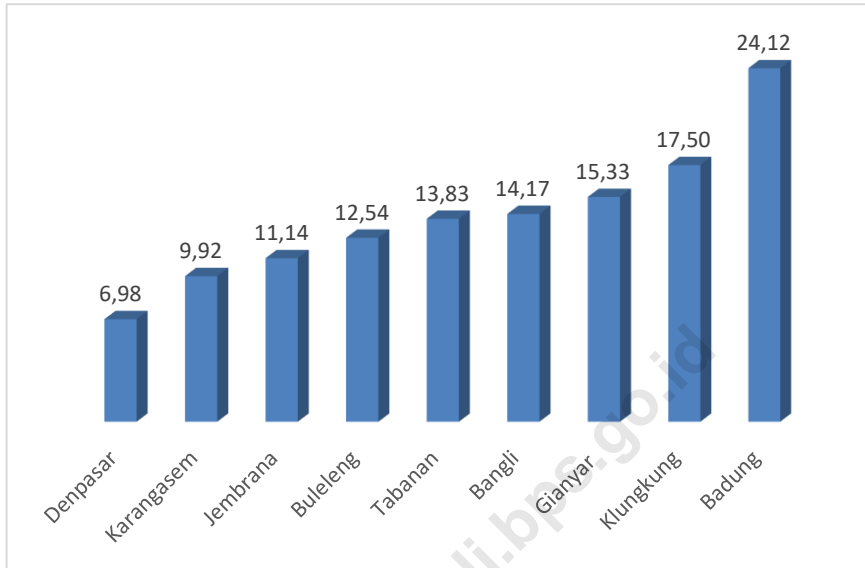
serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 1,13 triliun rupiah dan 1,04 triliun rupiah. Pada tahun 2017, dari seluruh kabupaten/kota di Bali, tercatat 3 (tiga) pemerintah kabupaten yang realisasi pengeluaran APBDnya lebih besar realisasi pendapatannya. Kekurangan ini dipenuhi melalui dari sisa komponen pembiayaan daerah.



Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se- Provinsi Bali pada periode 2013 – 2017 berada di atas delapan persen (Gambar 3). Pendapatan daerah Kabupaten Badung tercatat mencapai rata – rata tertinggi di Provinsi Bali dalam periode tahun 2013-2017, yaitu 16,79 persen per tahun. Posisi berikutnya diduduki oleh Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masing-masing sebesar 14,81 persen dan 14,55 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam periode 2013 – 2017 terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 8,25 persen per tahun.





Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-
Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)

Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun dalam rentang waktu 2013 – 2017 seperti tertuang dalam gambar 4, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang paling tinggi tercatat di Kabupaten Badung dengan rata-rata belanja daerah per tahun mencapai 24,12 persen, disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang tercatat paling rendah tercatat di Kota Denpasar mencapai 6,98 persen.

Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4, terlihat bahwa beberapa wilayah memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 2013 – 2017 per tahunnya melebihi tingkat pertumbuhan pendapatannya, yaitu Kabupaten Tabanan, Bangli, Gianyar, Klungkung, dan Badung. Sebaliknya Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar tercatat memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih tinggi dari pada pertumbuhan belanja daerahnya.

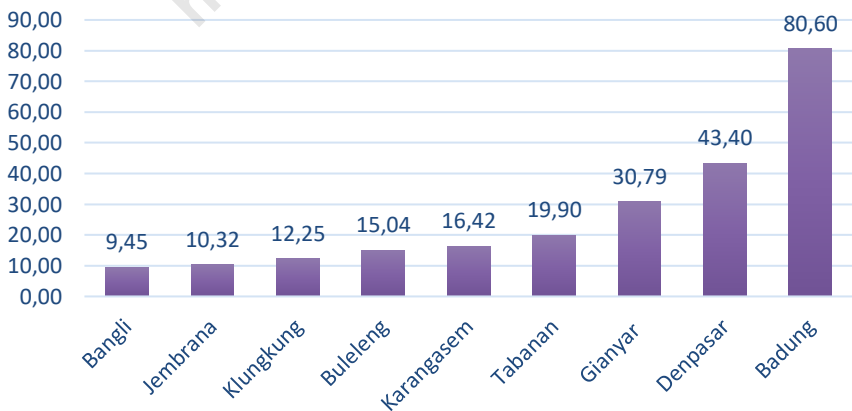




3.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada Pemerintah Daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2013 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 5.



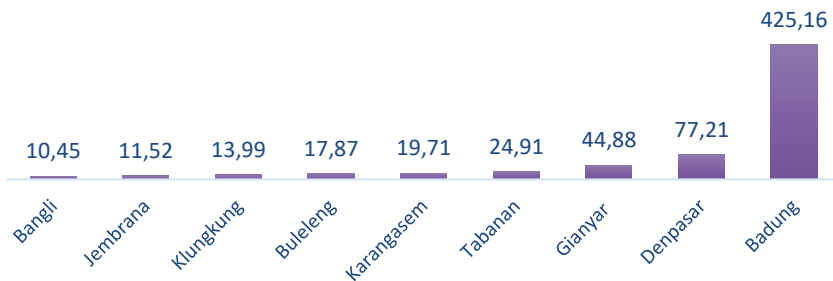
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)





Bila dilihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tercatat Kabupaten Badung memiliki nilai tertinggi, mencapai 80,60 persen. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi tentang pengelompokkan nilai derajat desentralisasi, terlihat bahwa Kabupaten Bangli tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang. Selanjutnya Kabupaten Jembrana, Klungkung, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang masih kurang. Sementara itu Kabupaten Gianyar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sedang, dan Kota Denpasar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang baik. Satu – satunya kabupaten yang mampu memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik di Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung. Hal ini tidak luput dari potensi yang dimiliki Badung sebagai sentra pariwisata dan merupakan kabupaten dengan PAD terbesar terbesar di Bali.

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian/rasio antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77). Dalam kurun waktu 2013 – 2017, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:



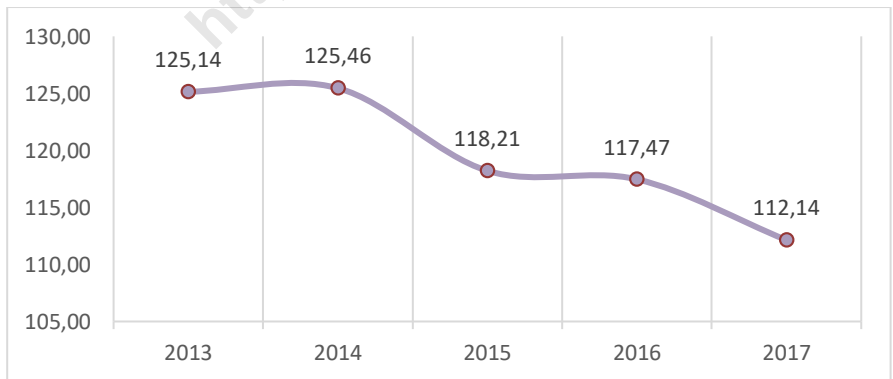
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)





Seperti yang disajikan pada Gambar 6, Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 425,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kemandirian fiskal yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai empat kali lipat dari pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, hanya 10,45 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Daerah Bangli masih belum mandiri secara fiskal dan masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya.

Meningat peran PAD merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, Pemerintah Daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD tersebut secara efektif dan efisien. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.



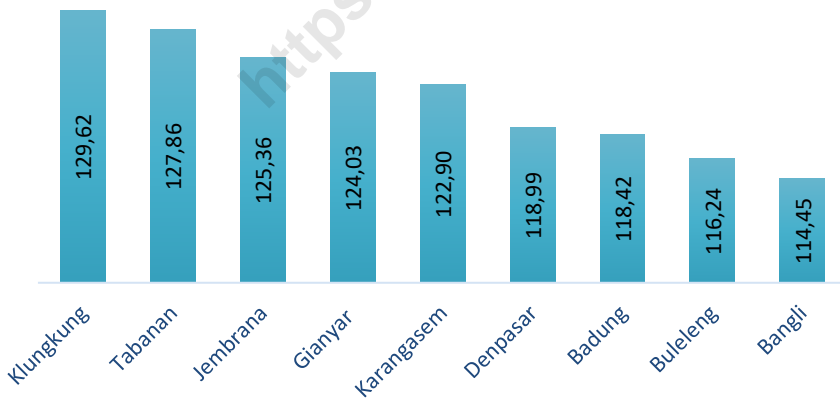
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)





Secara umum, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2013 – 2017 masih menunjukkan nilai di atas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD selalu lebih tinggi dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD. Namun perkembangan rasio ini selama periode 2013 – 2017 menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Rasio tertinggi tercatat pada tahun 2014 sebesar 125,46 persen dan terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar 112,14 persen.

Bila dilihat rata – rata rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2013 – 2017, terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali memiliki nilai rasio di atas 100 (Gambar 8). Kabupaten Klungkung tercatat memiliki nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu sebesar 129,62 persen. Sementara kabupaten/kota dengan rasio terendah tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 114,45 persen. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai PAD sehingga dapat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.



Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)

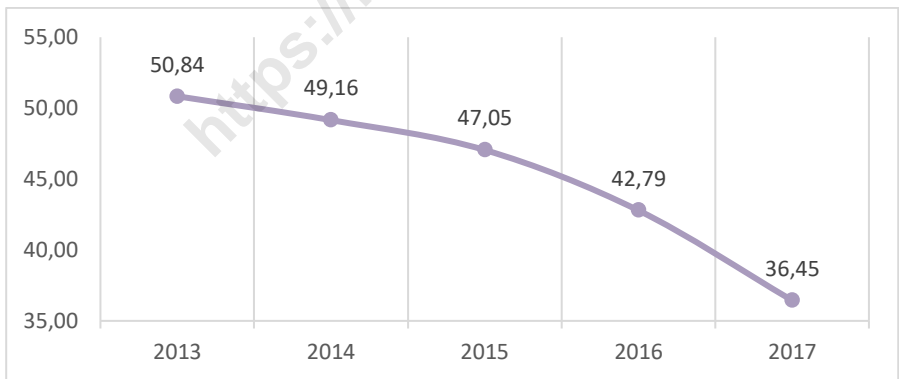




3.3 Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah di samping memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja suatu daerah dapat memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2013 – 2017 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Pada tahun 2013, presentase belanja pegawai Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali berada di atas 50 persen. Namun mulai tahun 2014, rasio belanja pegawai sudah tercatat menurun dan berada di bawah 50 persen (Gambar 9). Tingginya rasio belanja pegawai pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota ini mungkin terkait dengan tingginya jumlah pegawai daerah, baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS.



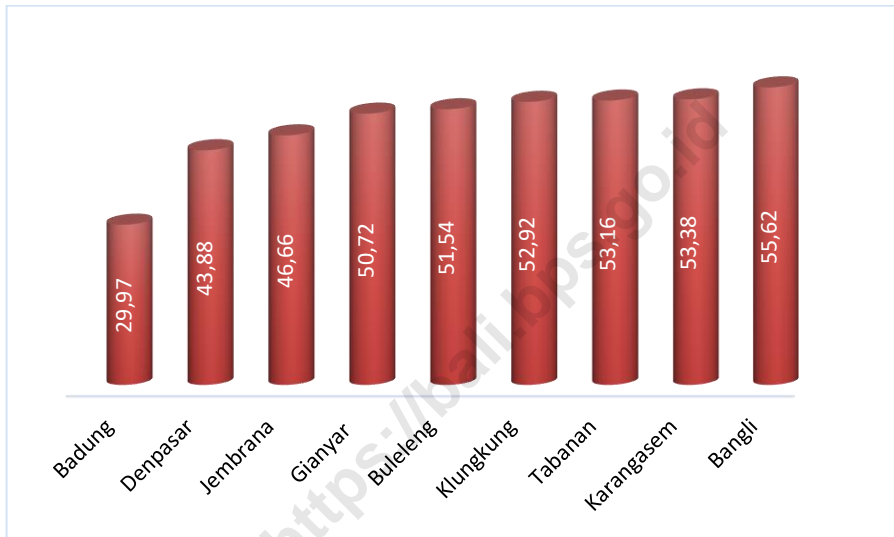
Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)

Dalam rentang waktu 2013 – 2017, dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana yang tercatat memiliki nilai rata – rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah dibawah 50 persen yaitu masing-masing sebesar 29,97 persen





43,88 persen dan 44,66 persen (Gambar 10). Sementara itu, kabupaten lainnya masih memiliki rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50 persen. Secara rata - rata, rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi dalam periode 2013 - 2017 tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 55,62 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem dan Tabanan masing-masing sebesar 53,38 persen dan 53,16 persen.

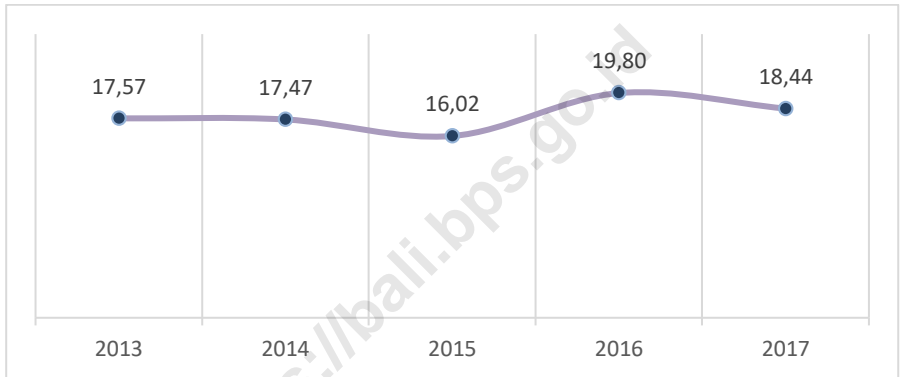


Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 - 2017 (persen)

Di samping belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal. Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu bentuk dari belanja modal oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.



Ratio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2013 – 2017 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan (Gambar 11). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2013 – 2017 tercatat masih berada dibawah 20 persen.



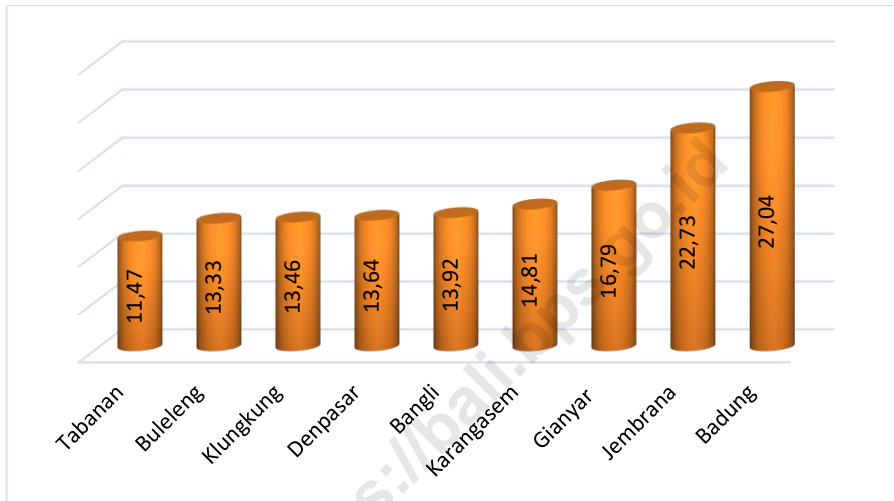
Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)

Rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 12. Kabupaten Badung memiliki nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tertinggi yaitu mencapai 27,04 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu 2013 – 2017. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja terendah tercatat di Kabupaten Tabanan. Walaupun Tabanan termasuk daerah dengan pendapatan daerah yang cukup besar dan berada pada posisi empat besar





di tahun 2017, namun dalam kurun waktu 2013 – 2017, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerahnya hanya mencapai 11,47 persen, lebih kecil daripada Kabupaten Bangli yang notabene merupakan daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil pada tahun 2017.



Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017 (persen)



<https://bali.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL





Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

	Rincian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	PENDAPATAN DAERAH	693.772.159	766.305.431	836.696.489	1.055.603.785	1.096.717.726
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.775.109	65.680.235	72.832.071	88.244.045	119.758.102
1.1	Hasil Pajak Daerah	18.512.225	20.406.000	24.286.000	31.646.000	40.469.000
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.306.800	9.324.885	9.575.682	9.658.801	12.963.203
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.850.000	3.986.800	5.937.000	4.028.019	6.192.679
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.106.084	31.962.550	33.033.389	42.911.225	60.133.220
2	DANA PERIMBANGAN	511.597.003	550.401.204	29.732.457	716.423.706	754.947.556
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.274.007	22.029.070	20.442.465	20.748.312	23.086.646
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	450.919.726	484.825.804	486.895.030	562.525.134	562.525.134
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.403.270	43.546.330	63.039.590	133.150.260	169.335.776
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	127.400.047	150.223.992	193.487.333	250.936.034	222.012.068
3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.868.021	77.364.265	105.791.275	131.887.498	99.204.282
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.680.144	70.517.727	81.759.988	89.875.057	50.084.685
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.851.882	2.342.000	825.000	1.310.000	36.247.537
3.6	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	5.111.070	27.863.479	36.475.565
B	BELANJA DAERAH	720.054.951	798.331.840	875.100.013	1.094.006.785	1.139.911.622
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	439.268.856	468.885.497	535.450.413	607.467.723	575.436.680
1.1	Belanja Pegawai	377.721.422	399.928.196	433.300.140	491.987.486	443.112.985
1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4	Belanja Hibah	12.410.654	16.483.654	40.468.654	13.621.044	14.210.390
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.410.000	3.410.000	700.000	2.880.698	2.880.698
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.843.127	8.476.313	10.826.414	15.082.796	15.957.864
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	37.383.653	40.147.334	49.755.205	83.495.699	98.874.743
1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	BELANJA LANGSUNG	280.786.095	329.446.343	339.649.600	486.539.062	564.474.942
2.1	Belanja Pegawai	35.019.951	28.276.605	33.332.647	42.042.592	48.974.275
2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.885.953	154.026.486	156.078.816	192.015.343	236.306.765
2.3	Belanja Modal	125.880.190	147.143.252	150.238.137	252.481.128	279.193.902
C	PEMBIAYAAN	26.282.791	32.026.409	4.568.122	38.403.000	43.193.895
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.679.791	41.494.848	48.362.528	48.385.706	53.176.602
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.482.791	36.231.954	43.099.634	42.321.143	47.112.039
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	62.894	0	664.563	664.563
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	62.894	0	0
1.8	Lainnya	6.197.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.397.000	9.468.439	9.959.004	9.982.706	9.982.706
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	4.268.439	4.759.004	4.582.706	4.582.706
2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	997.000	0	0	0	0
2.5	Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.110.810.797	1.260.942.535	1.405.197.386	1.826.470.474	1.847.829.532
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.799.113	212.931.601	243.793.958	270.777.557	327.462.528
1.1 Hasil Pajak Daerah	57.208.398	63.408.398	84.249.480	96.019.397	96.019.397
1.2 Hasil Retribusi Daerah	28.714.329	37.841.187	41.458.781	43.362.260	21.833.196
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.925.321	8.046.089	8.046.089	7.322.114	7.322.114
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.951.065	103.635.927	110.039.608	124.073.786	202.287.821
2 DANA PERIMBANGAN	730.087.497	798.650.500	107.177.945	1.184.284.312	1.135.165.882
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.009.432	20.514.480	23.038.891	24.580.187	27.130.191
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	663.156.595	719.621.530	722.004.642	826.283.780	826.283.780
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	48.921.470	58.514.490	59.386.100	333.420.345	281.751.911
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	197.924.187	249.360.434	356.973.795	371.408.605	385.201.122
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	97.676.154	61.213.907
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.789.282	96.342.065	132.459.065	162.078.638	158.426.761
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.586.909	146.900.369	224.111.730	88.183.813	113.917.874
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.547.996	6.118.000	403.000	23.470.000	51.642.580
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1.142.530.797	1.287.757.355	1.429.917.386	1.870.990.474	2.103.349.532
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	780.426.324	888.661.528	1.045.313.438	1.233.031.906	1.127.348.308
1.1 Belanja Pegawai	681.735.119	769.764.376	878.463.853	1.007.000.725	847.890.938
1.2 Belanja Bunga	100.000	100.000	100.000	100.000	2.200.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	24.453.000	32.355.000	41.001.813	6.684.700	38.387.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	6.000.000	9.000.000	3.300.000	3.300.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.099.798	6.689.000	8.668.700	13.938.166	14.417.336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	59.637.765	71.117.960	107.077.858	201.021.515	220.771.400
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.400.643	2.635.192	1.001.214	986.800	381.634
2 BELANJA LANGSUNG	362.104.473	399.095.827	384.603.948	637.958.568	976.001.224
2.1 Belanja Pegawai	14.428.268	14.970.987	22.661.449	33.430.192	30.364.133
2.2 Belanja Barang dan Jasa	223.003.943	260.978.974	282.243.569	391.631.744	429.869.090
2.3 Belanja Modal	124.672.262	123.145.866	79.698.930	212.896.632	515.768.001
C PEMBIAYAAN	31.720.000	26.814.820	65.235.151	44.520.000	255.520.000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.000.000	32.094.820	40.000.000	55.000.000	266.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.000.000	32.094.820	40.000.000	55.000.000	65.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	201.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.280.000	5.280.000	15.280.000	10.480.000	10.480.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000	5.200.000	14.400.000	10.200.000	10.400.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	80.000	80.000	880.000	80.000	80.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	200.000	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	2.494.697.356	2.804.744.832	3.251.270.645	3.833.480.597	4.660.821.496
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.874.766.393	2.197.959.213	2.581.898.769	2.938.005.742	3.823.175.373
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.726.810.360	1.986.068.719	2.302.810.000	2.562.460.318	3.308.382.257
1.2 Hasil Retribusi Daerah	64.555.270	75.687.001	75.244.749	104.699.674	101.132.656
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.590.838	77.554.931	111.812.395	143.726.455	237.148.583
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.809.925	58.648.562	92.031.625	127.119.295	176.511.877
2 DANA PERIMBANGAN	404.924.830	356.523.053	55.276.625	655.497.759	628.006.623
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31.738.647	31.156.198	62.789.526	84.552.733	86.179.375
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	372.625.383	324.815.695	286.763.106	336.243.365	366.684.189
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	560.800	551.160	0	234.701.661	175.143.059
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	215.006.133	250.262.566	319.819.244	239.977.096	209.639.499
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106.705.857	112.889.003	164.056.474	168.881.669	161.618.880
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.432.769	113.491.184	155.557.770	70.890.427	47.815.619
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.909.325	571.000	205.000	205.000	205.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.958.182	23.311.379	0	0	0
B BELANJA DAERAH	2.859.793.967	3.269.667.130	3.527.203.220	4.060.564.778	5.451.343.322
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.464.760.252	1.632.668.191	1.901.565.200	2.157.154.322	2.630.541.745
1.1 Belanja Pegawai	928.622.880	1.048.987.236	1.117.317.956	1.216.401.160	1.310.756.526
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	2.090.000	3.870.000	5.420.000	4.550.000	9.340.792
1.4 Belanja Hibah	63.545.583	76.624.649	183.489.696	224.855.879	421.897.203
1.5 Belanja Bantuan Sosial	55.001.742	34.150.000	34.150.000	39.450.000	70.775.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	195.922.510	241.519.389	286.013.710	338.835.264	423.163.490
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	216.577.537	224.516.917	272.173.838	330.062.018	386.308.734
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.300.000
2 BELANJA LANGSUNG	1.395.033.715	1.636.998.939	1.625.638.020	1.903.410.456	2.820.801.577
2.1 Belanja Pegawai	74.320.572	67.333.155	66.383.972	57.957.111	85.578.001
2.2 Belanja Barang dan Jasa	428.038.244	571.809.035	569.848.140	691.839.157	1.394.196.467
2.3 Belanja Modal	892.674.899	997.856.749	989.405.908	1.153.614.187	1.341.027.109
C PEMBIAYAAN	365.096.611	464.922.298	411.341	328.747.214	790.521.826
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	479.096.611	464.922.298	275.932.575	498.550.684	790.521.826
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	479.096.611	464.922.298	275.932.575	498.550.684	790.521.826
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	114.000.000	0	0	169.803.470	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	114.000.000	0	0	169.803.470	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	101.663.033	0



Table 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.112.299.413	1.187.870.082	1.339.991.864		1.623.511.105
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	238.558.925	312.160.449	370.679.368		448.142.329
1.1 Hasil Pajak Daerah	156.458.723	211.596.789	248.254.234		310.977.532
1.2 Hasil Retribusi Daerah	27.546.296	30.560.391	31.668.994		35.691.785
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.339.119	6.616.161	9.902.111		8.717.260
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49.214.788	63.387.108	80.854.029		92.755.752
2 DANA PERIMBANGAN	683.872.430	684.180.739	73.111.095		965.786.291
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.420.424	12.623.291	24.729.422		26.587.184
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	609.293.266	626.674.608	641.915.439		705.975.450
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.158.740	44.882.840	0		233.223.657
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.868.058	191.528.894	302.667.635		209.582.485
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0		0
3.2 Dana Darurat	0	0	0		0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	69.626.817	73.596.586	107.660.232		126.758.477
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.634.566	110.908.308	188.602.403		82.239.008
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.606.676	7.024.000	6.405.000		585.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0		0
B BELANJA DAERAH	1.156.799.413	1.285.370.082	1.445.120.459		1.916.464.409
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	765.204.605	816.325.763	993.556.610		1.096.395.236
1.1 Belanja Pegawai	670.620.250	699.814.264	838.350.786		832.679.167
1.2 Belanja Bunga	0	0	0		5.250.000
1.3 Belanja Subsidi	2.872.920	0	0		0
1.4 Belanja Hibah	25.053.300	23.881.650	22.514.710		44.029.118
1.5 Belanja Bantuan Sosial	8.475.000	9.989.130	5.173.630		5.185.800
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.612.785	31.492.420	32.725.924		42.097.124
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	34.270.350	50.648.299	94.291.560		166.654.028
1.8 Belanja Tidak Terduga	300.000	500.000	500.000		500.000
2 BELANJA LANGSUNG	391.594.808	469.044.319	451.563.849		820.069.174
2.1 Belanja Pegawai	32.164.235	36.415.667	44.133.377		51.772.799
2.2 Belanja Barang dan Jasa	176.459.357	231.697.502	216.148.494		307.443.712
2.3 Belanja Modal	182.971.217	200.931.150	191.281.978		460.852.662
C PEMBIAYAAN	44.500.000	97.500.000	83.915.981		292.953.304
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000	105.000.000	112.628.595		308.003.304
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50.000.000	105.000.000	112.628.595		158.003.304
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0		0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0		0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0		150.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0		0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0		0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0		0
1.8 Lainnya	0	0	0		0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000	7.500.000	7.500.000		15.050.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0		15.050.000
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000	7.500.000	7.500.000		0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0		0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0		0
2.5 Lainnya	0	0	0		0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0		0





Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	613.644.989	667.389.254	838.871.569	1.067.796.991	1.032.084.018
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.541.694	69.749.456	89.563.450	121.979.255	124.016.073
1.1 Hasil Pajak Daerah	7.020.496	12.946.461	17.038.900	35.943.923	34.078.743
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.575.127	19.876.663	19.609.138	21.841.439	26.594.177
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.963.550	8.619.793	8.101.503	7.773.398	8.170.275
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.982.522	28.306.539	44.813.909	56.420.495	55.172.878
2 DANA PERIMBANGAN	507.661.415	531.480.691	39.436.391	714.620.572	673.758.014
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.775.716	14.785.505	18.650.569	20.406.590	22.492.122
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	444.174.019	474.427.796	484.541.151	539.855.201	539.855.201
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.711.680	42.267.390	54.045.790	154.358.781	111.410.691
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.411.879	66.159.107	192.070.609	231.197.165	234.309.931
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	33.633.600	4.800.000
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.231.304	58.483.707	78.500.342	130.084.428	113.391.928
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	98.167.267	34.259.137	95.883.195
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.210.575	7.675.400	15.403.000	33.220.000	20.234.808
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	647.135.362	709.378.305	912.707.523	1.216.958.321	1.146.303.633
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	433.248.609	455.215.480	597.789.006	620.162.388	634.019.416
1.1 Belanja Pegawai	357.658.272	381.191.187	490.736.393	503.390.607	481.812.398
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	2.000.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	46.543.176	41.666.374	37.993.734	3.432.200	38.123.494
1.5 Belanja Bantuan Sosial	551.000	2.081.977	1.662.500	2.698.000	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.519.352	2.519.352	7.447.241	7.246.883	6.067.292
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.976.809	27.456.590	59.649.138	96.463.939	104.304.429
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.000.000	300.000	300.000	6.930.759	1.711.803
2 BELANJA LANGSUNG	213.886.753	254.162.825	314.918.517	596.795.933	512.284.217
2.1 Belanja Pegawai	17.420.901	11.455.689	14.046.907	23.911.163	20.031.093
2.2 Belanja Barang dan Jasa	113.569.926	154.470.454	175.184.539	325.727.702	297.666.297
2.3 Belanja Modal	82.895.927	88.236.682	125.687.071	247.157.069	194.586.827
C PEMBIAYAAN	33.490.374	42.682.754	13.008.529	149.161.330	114.219.615
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.740.374	45.432.754	76.210.954	155.886.330	122.244.615
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.535.374	44.682.754	75.835.954	154.861.330	102.244.615
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	20.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	1.205.000	750.000	375.000	1.025.000	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.250.000	2.750.000	2.375.000	6.725.000	8.025.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.250.000	2.750.000	2.375.000	6.725.000	8.025.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	693.703	0	0	0



Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	653.197.481	721.635.214	826.028.973	1.030.680.245	1.066.943.918
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.000.000	55.200.000	82.000.000	92.000.000	117.500.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	7.101.021	10.161.312	10.241.554	12.333.000	14.982.887
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.623.598	14.045.488	22.252.888	22.054.154	28.284.993
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000	4.400.200	3.318.478	3.115.143	5.110.553
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19.775.381	26.593.000	46.187.080	54.497.703	69.121.567
2 DANA PERIMBANGAN	511.399.438	548.602.929	44.715.580	772.968.948	763.517.158
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.883.194	19.026.004	19.079.052	19.142.433	21.192.135
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	450.812.694	486.381.005	499.734.801	568.278.934	568.278.934
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	41.703.550	43.195.920	55.096.890	185.547.581	174.046.089
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.798.044	117.832.285	170.118.230	165.711.297	185.926.760
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.790.913	60.133.119	80.308.152	117.900.992	116.617.667
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.289.956	55.975.166	86.367.248	43.090.305	55.783.753
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.717.175	1.724.000	3.442.830	4.720.000	13.525.340
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	688.479.409	784.773.769	930.895.765	1.135.996.245	1.137.341.371
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	509.620.090	560.902.120	662.045.111	694.104.942	628.256.778
1.1 Belanja Pegawai	411.795.654	445.509.408	531.937.565	576.004.084	446.464.222
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	1.165.000	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	20.350.419	35.076.399	41.927.000	685.000	9.676.835
1.5 Belanja Bantuan Sosial	5.036.450	4.473.000	1.300.000	0	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.972.462	2.420.830	3.300.444	3.439.215	4.326.789
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	68.300.105	71.922.483	82.680.102	112.976.643	166.788.932
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.000.000	1.500.000	900.000	1.000.000	1.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	178.859.319	223.871.649	268.850.654	441.891.303	509.084.593
2.1 Belanja Pegawai	21.339.245	21.072.750	48.455.058	61.418.633	56.811.196
2.2 Belanja Barang dan Jasa	102.237.917	133.919.731	124.704.281	153.360.232	170.051.948
2.3 Belanja Modal	55.282.157	68.879.168	95.691.315	227.112.438	282.221.449
C PEMBIAYAAN	35.281.928	63.138.555	2.741.893	105.316.000	70.397.453
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.281.928	63.638.555	104.866.792	110.000.000	70.397.453
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.281.928	63.638.555	104.866.792	110.000.000	70.397.453
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	500.000	0	4.684.000	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	500.000	0	4.684.000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	957.295.413	1.116.371.215	1.226.081.077	1.766.956.768	1.553.327.398
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.991.228	160.008.363	205.273.392	233.609.397	233.653.020
1.1 Hasil Pajak Daerah	86.292.000	99.758.423	125.839.116	134.299.663	138.301.371
1.2 Hasil Retribusi Daerah	9.050.205	10.191.800	10.236.014	12.098.415	11.236.990
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.250.300	15.418.140	14.633.230	12.333.527	12.862.601
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.398.723	34.640.000	54.565.032	74.877.792	71.252.058
2 DANA PERIMBANGAN	642.839.138	701.929.283	50.855.032	1.258.489.522	974.180.548
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.647.713	26.661.842	23.024.006	23.084.489	25.557.964
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	563.981.785	614.793.461	633.241.287	732.963.859	759.506.567
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51.209.640	60.473.980	69.845.030	502.441.174	189.116.017
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	174.465.047	254.433.569	294.697.362	274.857.849	345.493.830
3.1 Pendapatan Hibah	420.000	420.000	0	64.381.193	56.872.100
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.209.968	63.995.987	91.401.629	109.637.535	112.994.623
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	79.110.834	116.152.134	166.686.741	49.301.984	71.182.742
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	34.724.245	73.865.448	36.608.992	51.537.137	104.444.365
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1.049.658.680	1.155.747.491	1.269.495.869	1.811.460.388	1.573.795.980
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	681.484.820	765.199.902	895.592.830	1.194.242.956	891.028.314
1.1 Belanja Pegawai	581.596.339	658.216.931	721.799.958	1.011.539.063	698.490.517
1.2 Belanja Bunga	8.165.000	8.165.000	8.165.000	5.000.000	1.500.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	27.187.500	30.436.007	42.556.326	2.980.500	12.063.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.955.000	3.000.000	3.242.000	955.000	1.810.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.154.302	15.071.742	13.607.513	14.639.808	14.953.836
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	45.226.679	47.310.222	103.222.033	157.128.585	160.210.961
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	368.173.860	390.547.589	373.903.039	617.217.432	682.767.666
2.1 Belanja Pegawai	19.921.986	19.576.789	20.644.145	29.605.535	39.709.286
2.2 Belanja Barang dan Jasa	173.168.855	211.036.689	236.147.176	344.268.642	408.098.356
2.3 Belanja Modal	175.083.019	159.934.111	117.111.718	243.343.256	234.960.024
C PEMBIAYAAN	92.363.267	39.376.276	16.680.763	44.503.620	20.468.582
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	111.863.267	66.389.276	72.795.932	73.003.620	45.068.582
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	46.045.844	66.389.276	72.795.932	73.003.620	45.068.582
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	65.817.423	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.500.000	27.013.000	29.381.140	28.500.000	24.600.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000	2.000.000	4.368.140	4.500.000	3.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	14.500.000	25.013.000	25.013.000	24.000.000	21.000.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.286.766.285	1.468.256.803	1.668.718.324	2.082.621.121	2.157.390.809
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	128.000.000	176.133.800	221.903.000	273.607.818	351.807.706
1.1 Hasil Pajak Daerah	40.958.425	68.972.337	85.782.281	115.956.038	143.297.958
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.131.756	13.106.070	13.018.096	18.359.171	20.486.873
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.734.199	12.730.798	11.961.901	13.329.765	15.029.632
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.175.620	81.324.595	111.140.722	125.962.844	172.993.243
2 DANA PERIMBANGAN	906.226.901	957.813.099	99.931.800	1.364.898.869	1.338.584.136
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.495.661	38.382.641	33.629.377	32.090.906	35.522.652
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	796.419.220	854.532.248	868.511.959	982.698.080	982.698.080
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	67.312.020	64.898.210	74.876.950	350.109.883	320.363.404
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252.539.384	334.309.904	469.797.038	444.114.434	466.998.967
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	120.747.557	127.877.285	172.687.624	198.737.341	199.809.021
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.009.808	186.575.619	281.331.752	210.322.093	249.994.837
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.782.018	19.857.000	15.777.662	35.055.000	17.195.109
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1.401.593.792	1.605.091.833	1.785.202.066	2.156.911.480	2.145.790.809
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	917.199.812	986.233.738	1.176.323.664	1.281.299.177	1.176.666.558
1.1 Belanja Pegawai	806.791.653	867.579.713	982.146.961	996.202.896	818.897.684
1.2 Belanja Bunga	60.000	60.000	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	28.710.000	28.000.000	35.329.407	39.889.310	93.137.600
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.915.000	4.515.000	4.765.000	150.000	811.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.930.093	8.207.841	9.880.038	13.431.521	16.400.000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.378.445	71.844.402	138.942.445	230.027.309	245.169.716
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.414.711	6.026.782	5.259.813	1.598.141	2.250.558
2 BELANJA LANGSUNG	484.393.980	618.858.065	608.878.402	875.612.303	969.124.251
2.1 Belanja Pegawai	28.913.324	30.395.700	31.674.659	49.241.794	58.257.547
2.2 Belanja Barang dan Jasa	254.209.425	327.145.718	343.487.160	520.050.860	630.357.395
2.3 Belanja Modal	201.271.232	261.316.647	233.716.583	306.319.650	280.509.309
C PEMBIAYAAN	114.827.507	136.835.000	17.209.024	74.290.359	-11.600.000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.377.507	145.000.000	127.133.742	84.590.359	0
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.377.507	145.000.000	127.133.742	84.590.359	0
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.550.000	8.165.000	10.650.000	10.300.000	11.600.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	10.300.000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.250.000	7.865.000	10.650.000	0	11.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	300.000	300.000	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Table 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.278.760.313	1.467.521.163	1.725.426.452	2.014.147.069	1.917.638.288
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	513.061.591	610.266.592	681.259.855	715.452.848	805.299.902
1.1 Hasil Pajak Daerah	403.000.000	468.840.592	523.978.712	533.177.648	577.409.173
1.2 Hasil Retribusi Daerah	38.079.489	44.804.344	44.029.560	46.231.038	45.463.880
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.325.102	24.815.606	24.531.583	25.758.162	38.614.201
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.657.000	71.806.050	88.720.000	110.286.000	143.812.649
2 DANA PERIMBANGAN	656.582.041	715.256.133	76.600.000	1.087.392.416	913.883.197
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.982.449	74.651.447	71.101.582	85.655.993	96.679.366
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	580.807.702	615.961.906	625.978.507	661.794.756	661.794.765
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.791.890	24.642.780	5.226.190	339.941.667	155.409.066
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.116.680	141.998.438	341.860.318	211.301.805	198.455.189
3.1 Pendapatan Hibah	1.688.512	1.636.248	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.529.183	106.343.905	158.753.502	184.188.800	160.963.373
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	22.763.285	182.856.816	26.863.005	7.500.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.898.985	11.255.000	250.000	250.000	29.991.816
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	1.353.987.823	1.552.521.163	1.760.606.869	2.126.032.569	2.055.069.223
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	661.132.515	750.941.457	1.016.504.141	1.241.083.854	1.045.037.374
1.1 Belanja Pegawai	579.045.203	626.718.909	830.056.405	991.172.729	782.708.053
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	26.665.000	33.616.568	72.361.689	34.097.575	61.824.414
1.5 Belanja Bantuan Sosial	162.500	325.000	2.672.913	2.672.913	3.498.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.187.618	21.544.000	29.044.000	57.940.869	62.042.817
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	35.072.194	66.846.980	79.369.134	152.199.768	131.964.090
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.000.000	1.890.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	692.855.308	801.579.706	744.102.728	884.948.715	1.010.031.849
2.1 Belanja Pegawai	54.688.927	18.637.751	17.674.915	21.132.491	25.710.394
2.2 Belanja Barang dan Jasa	388.529.059	511.682.959	516.563.756	577.298.327	612.276.065
2.3 Belanja Modal	249.637.322	271.258.996	209.864.057	286.517.897	372.045.390
C PEMBIAYAAN	75.227.510	85.000.000	11.861.634	111.885.500	137.430.935
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	89.979.713	100.000.000	100.000.000	122.385.500	159.913.672
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.979.713	100.000.000	100.000.000	122.385.500	100.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	59.913.672
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.752.203	15.000.000	64.819.583	10.500.000	22.482.737
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.752.203	15.000.000	64.819.583	10.500.000	10.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	11.982.737
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0



Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	745.334.983	823.352.410	903.622.270	1.090.625.089	1.186.843.211
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.485.482	89.349.645	98.032.646	114.533.487	121.342.475
1.1 Hasil Pajak Daerah	22.069.530	30.111.096	32.861.322	33.964.149	35.515.927
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.905.026	8.836.895	8.925.326	10.241.922	9.191.266
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.937.071	4.940.559	4.912.892	6.183.844	6.189.438
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.573.855	45.461.095	51.333.106	64.143.572	70.445.844
2 DANA PERIMBANGAN	517.834.703	546.799.187	577.461.799	707.078.035	727.758.128
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.511.707	18.427.053	15.688.309	20.162.001	20.189.436
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	450.919.726	484.825.804	486.895.030	562.525.134	552.643.376
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.403.270	43.546.330	74.878.460	124.390.900	154.925.317
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159.014.797	187.203.579	228.127.824	269.013.568	337.742.608
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	58.787.556	30.107.587
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.699.593	114.153.616	131.798.589	101.663.393	99.899.938
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.517.727	70.899.963	83.094.188	53.112.041	50.084.685
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.797.477	2.150.000	825.000	27.587.098	117.505.880
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	12.410.047	27.863.479	40.144.518
B BELANJA DAERAH	718.538.444	786.285.299	885.633.184	1.128.489.214	1.038.782.384
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	416.035.004	441.901.508	506.733.928	520.560.153	495.845.593
1.1 Belanja Pegawai	353.148.286	376.791.591	397.650.714	410.511.394	353.743.177
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	14.529.650	16.157.500	39.120.670	10.823.752	13.498.910
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.109.038	2.984.519	225.333	455.598	4.115.375
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.528.288	8.558.125	13.099.594	15.736.498	16.827.960
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.700.121	37.409.773	56.636.018	83.032.913	107.660.170
1.8 Belanja Tidak Terduga	19.622	0	1.599	0	0
2 BELANJA LANGSUNG	302.503.439	344.383.791	378.899.256	607.929.061	542.936.791
2.1 Belanja Pegawai	33.198.532	26.392.136	31.514.727	53.011.013	48.635.739
2.2 Belanja Barang dan Jasa	126.741.441	156.133.946	161.433.363	230.285.169	250.560.197
2.3 Belanja Modal	142.563.466	161.857.709	185.951.166	324.632.880	243.740.854
C PEMBIAYAAN	58.067.447	82.265.655	115.887.900	115.089.511	71.934.879
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.467.447	90.665.655	124.437.900	132.008.467	79.834.879
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.063.989	84.863.986	119.332.767	132.008.467	76.876.879
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	601.669	105.133	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5.403.458	5.200.000	5.000.000	0	2.958.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.400.000	8.400.000	8.550.000	16.918.956	7.900.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	3.200.000	3.550.000	16.918.956	5.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.000.000	0	2.900.000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	84.863.986	119.332.767	133.876.986	77.225.386	219.995.707



Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.253.026.819	1.367.078.412	1.615.933.308	1.794.601.450	1.871.864.103
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.418.219	273.426.482	300.799.020	318.083.799	426.635.751
1.1 Hasil Pajak Daerah	98.701.047	95.414.689	105.792.993	105.186.643	128.176.142
1.2 Hasil Retribusi Daerah	40.393.769	42.557.737	47.030.646	22.397.630	20.466.249
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.046.089	7.197.219	7.322.114	8.741.999	10.385.423
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.277.313	128.256.837	140.653.267	181.757.527	267.607.937
2 DANA PERIMBANGAN	734.577.587	799.770.748	815.846.445	1.102.265.093	1.096.289.816
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.499.522	21.634.728	17.441.963	23.775.525	23.944.695
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	663.156.595	719.621.530	722.004.642	826.283.780	811.768.631
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	48.921.470	58.514.490	76.399.840	252.205.788	260.576.490
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	263.031.013	293.881.182	499.287.843	374.252.558	348.938.536
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	93.214.569	101.080.965	5.645.303
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.713.962	129.514.006	157.674.595	113.082.190	131.145.049
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.900.369	159.747.176	247.995.679	88.183.813	113.917.874
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.416.682	4.620.000	403.000	22.969.446	98.230.310
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	48.936.144	
B BELANJA DAERAH	1.198.702.307	1.333.200.899	1.586.227.841	1.873.464.986	1.861.962.380
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	809.282.889	904.158.292	1.050.345.518	1.172.428.439	1.116.208.096
1.1 Belanja Pegawai	691.380.832	765.788.650	824.144.117	910.740.328	804.449.867
1.2 Belanja Bunga	62.830	53.534	44.197	31.394	13.536
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	34.772.500	42.877.500	45.344.113	37.395.400	67.797.086
1.5 Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	7.938.000	3.204.500	2.926.000	2.999.500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.099.798	6.689.000	12.978.454	14.417.336	14.417.336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	67.735.168	80.174.694	164.630.137	206.136.049	226.438.571
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.231.761	636.914	0	781.932	92.200
2 BELANJA LANGSUNG	389.419.418	429.042.607	535.882.323	701.036.547	745.754.284
2.1 Belanja Pegawai	13.194.053	13.824.716	33.905.165	27.146.895	22.159.485
2.2 Belanja Barang dan Jasa	248.038.980	278.872.986	389.007.715	416.829.978	433.029.612
2.3 Belanja Modal	128.186.385	136.344.905	112.969.443	257.059.674	290.565.187
C PEMBIAYAAN	38.204.187	87.466.515	117.690.293	146.569.365	55.422.906
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.482.222	92.899.550	121.968.328	148.047.400	65.850.941
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.369.497	92.528.624	121.329.374	147.395.730	65.213.158
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	370.926	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	112.725	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	638.954	651.670	
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	637.783
1.8 Lainnya	0	0	0	0	
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.278.035	5.433.035	4.278.035	1.478.035	10.428.035
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	200.000		
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000	5.355.000	4.000.000	1.200.000	10.350.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	78.035	78.035	78.035	78.035	78.035
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	
2.5 Lainnya	0	0	0	200.000	
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	92.528.698	121.344.102	147.395.760	67.705.829	65.324.629



Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	2.954.662.971	3.459.986.016	3.735.129.565	4.328.245.676	4.939.386.134
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.279.113.502	2.722.625.563	3.001.464.263	3.563.589.483	4.172.457.396
1.1 Hasil Pajak Daerah	2.010.554.251	2.339.332.865	2.598.718.130	2.968.152.918	3.490.156.150
1.2 Hasil Retribusi Daerah	90.457.626	116.502.661	96.040.159	118.514.066	128.717.148
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	71.350.740	125.339.003	142.995.660	186.013.183	255.932.876
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.750.885	141.451.034	163.710.314	290.909.316	297.651.222
2 DANA PERIMBANGAN	429.797.446	381.713.596	332.251.562	543.323.025	555.889.277
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.611.263	56.346.741	44.947.526	78.823.886	73.843.812
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	372.625.383	324.815.695	286.763.106	336.243.365	330.336.650
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	560.800	551.160	540.930	128.255.774	151.708.815
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	245.752.022	355.646.857	401.413.740	221.333.168	211.039.461
3.1 Pendapatan Hibah	0	70.344.473	75.091.364	0	1.779.222
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	102.342.371	130.253.478	162.799.634	150.237.741	56.696.422
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.491.184	131.532.528	163.317.741	70.890.427	47.815.619
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	960.285	205.000	205.000	205.000	104.748.198
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.958.182	23.311.379	0	0	0
B BELANJA DAERAH	2.755.459.722	3.276.164.110	3.446.634.315	4.162.119.988	5.413.936.423
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.488.224.177	1.654.384.787	1.909.366.328	2.100.194.081	2.758.358.887
1.1 Belanja Pegawai	881.464.639	982.021.269	1.035.507.051	1.094.429.122	1.186.173.131
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	2.090.000	3.837.400	5.393.600	4.378.338	7.476.568
1.4 Belanja Hibah	95.313.469	93.604.910	144.802.581	186.856.128	500.440.836
1.5 Belanja Bantuan Sosial	52.141.750	33.549.093	26.839.800	43.116.500	100.802.395
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212.227.730	272.387.605	332.221.197	385.408.982	493.114.327
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	234.132.969	268.781.366	364.602.099	385.529.239	458.163.692
1.8 Belanja Tidak Terduga	10.853.620	203.145	0	475.772	12.187.940
2 BELANJA LANGSUNG	1.267.235.545	1.621.779.323	1.537.267.986	2.061.925.907	2.655.577.536
2.1 Belanja Pegawai	75.694.058	63.427.200	59.742.497	52.697.107	106.950.527
2.2 Belanja Barang dan Jasa	424.829.297	609.282.785	554.753.161	814.112.678	1.307.515.345
2.3 Belanja Modal	766.712.190	949.069.337	922.772.328	1.195.116.122	1.241.111.665
C PEMBIAYAAN	688.998.737	739.884.087	625.326.073	910.007.075	1.075.636.186
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	902.998.737	893.884.087	925.326.073	914.810.545	1.076.416.778
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	901.461.570	888.147.920	923.705.992	913.860.040	1.076.132.762
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	455.618	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	1.537.167	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	5.736.167	1.164.463	0	284.016
1.8 Lainnya	0	0	0	950.505	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	214.000.000	154.000.000	300.000.000	4.803.470	780.592
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	214.000.000	154.000.000	300.000.000	4.803.470	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	780.592
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN	888.201.986	923.705.992	913.821.324	1.076.132.762	601.085.896



Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.248.415.648	1.400.913.781	1.527.797.536	1.682.778.978	1.808.814.501
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	319.612.005	424.472.546	457.321.018	529.864.618	662.753.475
1.1 Hasil Pajak Daerah	204.436.633	276.603.966	307.668.563	372.927.608	484.010.689
1.2 Hasil Retribusi Daerah	31.816.584	35.472.015	40.055.120	40.756.608	39.281.032
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.247.310	9.685.085	7.530.611	8.248.444	7.709.528
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	76.111.478	102.711.480	102.066.724	107.931.958	131.752.226
2 DANA PERIMBANGAN	690.817.394	694.464.178	673.568.860	905.918.780	916.514.053
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.365.388	22.906.730	18.983.901	27.323.005	26.054.640
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	609.293.266	626.674.608	641.915.439	705.975.450	693.573.732
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.158.740	44.882.840	12.669.520	172.620.325	196.885.681
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	237.986.249	281.977.057	396.907.658	246.995.580	229.546.974
3.1 Pendapatan Hibah	0	1.254.000	71.207.425	53.599.850	41.474.200
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.464.120	102.717.775	121.995.559	110.404.608	119.285.958
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	161.704.394	177.774.328	198.962.709	82.239.008	63.253.828
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.817.735	205.000	4.741.965	560.823	5.532.988
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	25.954	0	191.292	
B BELANJA DAERAH	1.192.027.629	1.354.851.666	1.504.436.669	1.786.411.745	1.922.948.830
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	770.124.483	862.790.093	936.408.399	1.074.627.473	1.067.478.185
1.1 Belanja Pegawai	642.045.061	729.415.554	766.423.103	789.248.493	709.640.772
1.2 Belanja Bunga	89	0	0	0	2.969.125
1.3 Belanja Subsidi	2.848.695	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41.656.367	29.888.691	24.717.940	50.029.224	109.963.202
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.107.844	10.137.470	5.172.084	2.018.306	1.761.596
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.839.464	31.767.119	31.719.899	47.086.496	60.677.964
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	40.625.763	60.969.556	107.944.073	185.620.386	182.284.687
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.200	611.702	431.300	624.567	180.839
2 BELANJA LANGSUNG	421.903.146	492.061.573	568.028.270	711.784.273	855.470.645
2.1 Belanja Pegawai	31.294.706	34.272.471	48.670.764	54.456.292	46.593.520
2.2 Belanja Barang dan Jasa	205.284.944	256.608.015	295.175.011	347.410.368	399.516.602
2.3 Belanja Modal	185.323.496	201.181.086	224.182.495	309.917.612	409.360.523
C PEMBIAYAAN	143.249.714	191.137.733	227.478.093	235.479.596	227.759.613
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	148.749.714	199.637.733	239.737.667	250.838.960	245.730.039
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.749.714	199.637.733	239.737.667	250.838.960	131.864.502
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	113.865.537
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000	8.500.000	12.259.574	15.359.364	17.970.426
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000	8.500.000	12.259.574	15.050.000	17.970.426
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	309.364	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	199.637.732	273.199.846	250.838.960	131.846.829	113.625.285



Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	711.405.235	827.028.807	907.139.632	1.062.218.238	1.098.938.730
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.401.910	98.837.766	120.035.996	134.142.054	153.210.776
1.1 Hasil Pajak Daerah	13.234.733	19.654.037	34.668.113	43.744.803	53.457.710
1.2 Hasil Retribusi Daerah	10.597.832	22.441.798	21.776.641	21.874.454	22.978.426
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.595.168	8.093.536	7.164.793	7.778.148	8.008.286
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.974.178	48.648.395	56.426.449	60.744.649	68.766.354
2 DANA PERIMBANGAN	496.925.310	532.950.783	542.012.560	699.514.521	653.544.539
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.967.531	16.255.597	14.233.393	19.439.467	20.319.282
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	444.174.019	474.427.796	484.541.151	539.855.201	530.371.681
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	32.783.760	42.267.390	43.238.016	140.219.853	102.853.576
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	147.078.015	195.240.258	245.091.076	228.561.663	292.183.415
3.1 Pendapatan Hibah	0	1.890.000	23.770.800	24.629.750	26.622.520
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.819.536	96.050.343	115.063.231	117.416.482	95.060.573
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.411.164	89.963.515	105.854.045	34.259.137	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	847.315	7.336.400	403.000	17.997.157	74.617.101
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	34.259.137	95.883.221
B BELANJA DAERAH	665.548.503	783.124.988	890.952.557	971.294.294	1.131.544.237
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	470.137.179	515.195.550	572.974.721	585.085.208	628.409.523
1.1 Belanja Pegawai	392.033.389	432.626.792	456.198.002	477.641.196	456.967.596
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	51.765.579	51.821.910	34.722.283	2.649.800	59.623.733
1.5 Belanja Bantuan Sosial	604.457	2.407.500	1.511.500	1.926.000	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	207.220	1.219.296	8.354.294	6.650.221	7.827.433
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.507.616	27.007.417	72.188.642	96.110.002	103.716.413
1.8 Belanja Tidak Terduga	18.918	112.636	0	107.990	274.348
2 BELANJA LANGSUNG	195.411.324	267.929.438	317.977.836	386.209.085	503.134.714
2.1 Belanja Pegawai	17.076.559	11.255.085	16.865.673	20.600.125	19.193.903
2.2 Belanja Barang dan Jasa	114.240.793	156.857.982	181.773.764	221.501.353	295.144.509
2.3 Belanja Modal	64.093.972	99.816.371	119.338.399	144.107.607	188.796.302
C PEMBIAYAAN	52.846.285	96.103.817	138.677.227	149.867.330	108.594.136
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	56.846.285	98.853.817	142.277.227	154.861.330	115.919.136
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.956.285	98.703.817	141.802.227	154.861.330	115.644.136
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	150.000	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	890.000	0	475.000	0	275.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000	2.750.000	3.600.000	4.994.000	7.325.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	3.600.000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000	2.750.000	0	4.994.000	7.325.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN	98.703.017	140.006.836	154.864.302	240.791.274	75.988.629



Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	702.229.030	793.647.679	873.469.027	1.040.303.804	1.093.254.986
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.986.570	76.141.461	87.731.141	104.829.402	104.592.348
1.1 Hasil Pajak Daerah	7.679.636	11.802.145	12.557.945	16.048.826	16.629.094
1.2 Hasil Retribusi Daerah	11.302.691	14.995.769	18.566.238	25.553.072	23.456.808
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.425.035	3.550.338	4.008.691	4.815.356	5.243.193
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.579.207	45.793.210	52.598.267	58.412.148	59.263.253
2 DANA PERIMBANGAN	513.012.768	546.402.982	569.345.606	752.414.034	736.569.769
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.512.514	16.826.057	14.512.035	19.060.280	19.962.147
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	450.812.694	486.381.005	499.734.801	568.278.943	558.296.101
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	38.687.560	43.195.920	55.098.770	165.074.811	158.311.521
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133.229.692	171.103.236	216.392.280	183.060.368	252.092.869
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	10.215.971	29.404.960
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.161.491	97.884.223	117.658.813	125.465.705	95.367.699
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.975.166	71.999.013	96.577.827	0	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.043.035	1.220.000	2.155.640	4.288.387	71.536.502
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.000	0	0	43.090.305	55.783.708
B BELANJA DAERAH	652.343.659	762.376.999	899.776.029	1.089.450.148	1.021.996.019
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	475.739.271	556.735.255	616.282.161	646.035.803	646.722.405
1.1 Belanja Pegawai	371.523.272	417.521.985	475.644.606	518.950.035	444.993.765
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165.000	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	32.678.300	61.031.213	45.155.081	8.239.307	17.610.320
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.264.325	3.255.000	1.080.000	2.214.280	3.854.024
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.972.462	2.420.830	3.335.672	3.709.836	4.326.734
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	67.135.912	71.375.085	91.066.802	112.855.906	175.738.250
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	1.131.142	0	66.440	199.312
2 BELANJA LANGSUNG	176.604.387	205.641.743	283.493.868	443.414.345	375.273.614
2.1 Belanja Pegawai	20.116.995	19.937.561	46.406.486	61.246.105	60.063.422
2.2 Belanja Barang dan Jasa	93.724.429	115.486.913	126.373.661	131.942.216	156.599.346
2.3 Belanja Modal	62.762.964	70.217.269	110.713.721	250.226.024	158.610.846
C PEMBIAYAAN	-3.694.086	96.836.097	127.941.507	86.555.239	31.649.497
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	675.000	101.336.097	127.941.507	103.455.210	37.012.847
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	100.203.467	127.941.507	103.455.210	37.012.847
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	675.000	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	1.132.630	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.369.086	4.500.000	0	16.899.971	5.363.350
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	4.500.000	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000	0	0	16.899.971	5.363.350
2.3 Pembayaran Pokok Utang	369.086	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	46.191.286	128.106.777	101.634.505	37.408.895	102.908.464



Table 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.041.577.611	1.248.392.023	1.367.577.564	1.462.024.349	1.525.846.347
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	168.652.790	239.425.005	243.125.914	232.644.013	198.575.057
1.1 Hasil Pajak Daerah	103.841.036	138.541.746	139.626.191	117.782.188	96.850.262
1.2 Hasil Retribusi Daerah	11.991.692	13.022.203	14.255.154	15.984.975	12.579.622
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.235.409	17.064.083	13.535.055	13.592.314	11.519.621
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.584.653	70.796.973	75.709.514	85.284.536	77.625.552
2 DANA PERIMBANGAN	644.192.869	695.408.544	706.426.130	937.628.022	949.134.029
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.001.444	20.141.103	17.307.499	22.447.406	23.233.118
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	563.981.785	614.793.461	633.241.287	732.963.859	722.184.384
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51.209.640	60.473.980	55.877.344	182.216.757	203.716.527
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	228.731.952	313.558.474	418.025.520	291.752.314	378.137.261
3.1 Pendapatan Hibah	425.450	3.509.238	79.127.259	73.937.390	57.937.129
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	66.786.104	95.553.641	105.387.045	102.832.588	115.364.651
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.152.134	142.071.021	178.178.534	49.301.984	71.182.742
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.360.033	72.414.169	55.317.714	65.670.951	130.625.907
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.231	10.405	14.968	9.401	3.026.832
B BELANJA DAERAH	1.078.485.761	1.164.666.358	1.351.846.275	1.450.662.759	1.506.221.683
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	688.108.423	761.203.217	889.847.572	929.460.208	879.475.826
1.1 Belanja Pegawai	576.905.293	643.596.813	703.046.385	748.260.250	689.865.417
1.2 Belanja Bunga	3.421.036	6.262.865	4.458.177	2.580.813	633.650
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41.429.597	32.191.765	41.061.315	5.882.089	11.370.600
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.489.140	2.418.500	675.828	901.010	1.461.164
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16.715.617	19.805.558	16.286.253	13.730.310	9.484.944
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	44.047.141	56.927.716	123.735.350	158.105.736	165.834.010
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.100.599	0	584.264	0	826.041
2 BELANJA LANGSUNG	390.377.338	403.463.141	461.998.703	521.202.550	626.745.857
2.1 Belanja Pegawai	18.845.308	16.731.571	27.540.823	30.270.433	22.141.110
2.2 Belanja Barang dan Jasa	190.794.382	209.173.812	256.033.241	300.494.138	367.534.861
2.3 Belanja Modal	180.737.648	177.557.758	178.424.639	190.437.979	237.069.886
C PEMBIAYAAN	138.305.125	71.668.610	127.129.691	114.446.431	102.921.920
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	147.340.373	101.416.983	155.856.074	142.694.804	125.692.990
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	80.587.755	101.396.976	155.844.274	142.685.297	125.641.509
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	65.744.496	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.000.000	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	8.122	20.007	11.800	0	51.481
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	9.507	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.035.248	29.748.373	28.726.383	28.248.373	22.771.070
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000	6.000.000	4.978.010	4.500.000	3.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	6.035.248	23.748.373	23.748.373	23.748.373	19.171.070
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN	101.396.975	155.844.274	142.860.980	125.808.022	122.546.584



Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.390.657.293	1.543.584.631	1.937.771.345	2.066.173.156	2.200.113.190
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.292.011	219.682.330	293.038.467	282.113.900	455.195.426
1.1 Hasil Pajak Daerah	57.770.211	85.017.340	110.723.083	102.239.173	124.234.062
1.2 Hasil Retribusi Daerah	14.872.963	12.684.819	19.944.242	15.129.372	17.076.084
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.732.894	11.740.066	12.657.529	15.030.437	14.141.580
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.915.942	110.240.105	149.713.612	149.714.918	299.743.700
2 DANA PERIMBANGAN	907.851.103	947.573.267	983.333.688	1.305.606.678	1.313.915.838
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.119.859	28.142.809	26.264.579	29.020.240	27.927.638
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	796.419.224	854.532.248	868.511.959	982.698.080	965.435.235
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	67.312.020	64.898.210	88.557.150	293.888.359	320.552.965
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	322.514.179	376.329.034	661.399.189	478.452.578	431.001.926
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	1.958.000	0	19.098.000
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131.792.220	152.730.072	194.472.620	204.521.694	163.566.162
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	186.572.702	218.781.224	463.880.846	246.211.291	161.193.237
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.208.921	4.350.000	777.662	27.719.594	87.017.797
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	940.336	467.738	310.062		126.730
B BELANJA DAERAH	1.413.380.933	1.558.960.849	1.865.996.555	2.200.205.551	2.122.121.858
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	944.333.238	1.024.745.249	1.121.044.573	1.274.346.716	1.165.260.447
1.1 Belanja Pegawai	828.895.332	892.968.692	911.423.652	961.075.607	799.949.287
1.2 Belanja Bunga	52.092	21.751	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	36.751.500	28.672.500	34.159.908	81.808.234	87.731.850
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.618.811	4.115.000	4.500.000	0	595.390
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.930.092	8.207.840	9.880.038	15.347.391	16.400.000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	69.352.870	83.733.566	160.890.165	214.928.828	255.766.877
1.8 Belanja Tidak Terduga	732.540	7.025.900	190.811	1.186.655	4.817.043
2 BELANJA LANGSUNG	469.047.695	534.215.600	744.951.983	925.858.836	956.861.411
2.1 Belanja Pegawai	30.365.373	29.705.058	54.131.113	56.958.806	42.559.182
2.2 Belanja Barang dan Jasa	252.785.605	320.882.679	464.500.743	523.752.143	619.081.519
2.3 Belanja Modal	185.896.717	183.627.864	226.320.127	345.147.887	295.220.710
C PEMBIAYAAN	134.355.572	108.688.273	91.254.055	162.504.812	15.860.272
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	145.944.219	111.631.932	93.312.055	162.604.812	26.558.272
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	145.944.219	111.631.932	93.312.055	162.604.812	26.558.272
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.588.647	2.943.659	2.058.000	100.000	10.698.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.315.946	2.700.000	2.058.000	100.000	10.698.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	272.701	243.659	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	111.631.932	93.312.055	163.028.844	28.472.417	93.851.604



Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	1.547.605.213	1.727.968.713	1.786.400.782	1.943.172.688	2.058.136.261
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	658.974.707	698.739.758	776.214.149	807.050.192	1.008.710.712
1.1 Hasil Pajak Daerah	504.981.564	510.582.656	549.362.947	574.258.306	700.340.768
1.2 Hasil Retribusi Daerah	47.874.288	54.764.870	59.243.427	49.614.843	40.052.788
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.774.563	24.953.438	35.341.143	35.317.015	47.788.911
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.344.292	108.438.795	132.266.631	147.860.028	220.528.245
2 DANA PERIMBANGAN	661.103.049	693.247.533	681.684.333	878.197.109	851.680.517
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	72.201.429	69.892.793	50.479.636	81.693.715	70.344.592
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	580.807.702	615.961.906	625.978.507	661.794.756	650.169.150
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.093.918	7.392.834	5.226.190	134.708.638	131.166.775
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	227.527.456	335.981.421	328.502.300	257.925.387	197.745.032
3.1 Pendapatan Hibah	1.487.687	4.110.072	0	75.172.241	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	98.076.351	126.747.131	170.161.549	155.640.141	160.398.117
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.408.208	204.874.218	158.090.751	5.000.000	7.500.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	555.210	250.000	250.000	250.000	1.418.859
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	21.863.005	28.428.056
B BELANJA DAERAH	1.537.883.625	1.648.378.769	1.757.644.194	1.871.440.897	1.967.311.319
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	800.979.096	903.436.801	1.034.937.556	1.037.975.540	1.041.281.701
1.1 Belanja Pegawai	672.344.600	755.951.062	769.525.774	789.551.175	717.438.207
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	58.971.605	46.883.417	87.123.626	53.396.265	99.761.657
1.5 Belanja Bantuan Sosial	218.635	162.500	2.723.500	3.460.600	2.625.220
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21.544.000	29.044.000	29.044.000	57.917.772	63.053.038
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	38.776.154	71.371.172	146.440.463	128.894.438	158.354.579
1.8 Belanja Tidak Terduga	9.124.102	24.650	80.193	4.755.291	49.000
2 BELANJA LANGSUNG	736.904.529	744.941.968	722.706.638	833.465.357	926.029.618
2.1 Belanja Pegawai	50.422.357	14.758.938	17.551.898	17.911.640	24.302.185
2.2 Belanja Barang dan Jasa	432.473.820	496.141.308	512.835.219	557.885.790	650.101.466
2.3 Belanja Modal	254.008.353	234.041.722	192.319.521	257.667.927	251.625.967
C PEMBIAYAAN	212.643.283	202.344.527	214.951.519	168.233.832	234.630.826
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	257.805.713	222.364.871	281.934.472	246.301.607	239.965.694
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	257.796.739	222.364.871	281.913.662	243.708.107	239.965.694
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	8.974	0	0	2.593.500	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	20.810	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.162.430	20.020.344	66.982.953	78.067.775	5.334.868
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.054.173	19.999.306	66.982.953	78.067.775	5.334.868
2.3 Pembayaran Pokok Utang	108.256	21.037	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN	222.364.872	281.934.472	243.708.107	239.965.623	325.455.768



Tabel 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	10.201.244.206	11.461.036.529	13.118.282.779	14.677.757.050	17.086.951.881
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.223.494.053	3.860.089.709	4.549.203.863	4.733.676.661	6.512.891.332
1.1 Hasil Pajak Daerah	2.503.361.648	2.942.159.031	3.422.480.277	3.521.835.987	4.810.890.695
1.2 Hasil Retribusi Daerah	213.562.870	255.437.829	267.093.902	278.304.951	306.821.552
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	103.478.429	162.188.518	198.244.290	217.388.584	336.573.195
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	403.071.108	500.304.331	661.385.394	716.149.139	1.058.605.891
2 DANA PERIMBANGAN	5.555.190.693	5.844.837.631	576.836.925	7.754.576.104	8.136.948.435
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	267.227.243	259.830.478	296.484.890	310.261.644	368.660.565
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	4.932.190.390	5.202.034.053	5.249.585.922	5.210.643.109	5.973.602.100
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	354.773.060	382.973.100	381.516.540	2.233.671.351	1.794.685.770
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.423.529.459	1.756.109.189	2.641.491.564	2.189.504.285	2.637.112.114
3.1 Pendapatan Hibah	2.108.512	2.056.248	0	195.690.947	122.886.007
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	733.498.902	777.025.922	1.091.618.295	1.203.396.901	1.242.297.766
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	587.744.986	823.283.792	1.465.441.715	612.785.821	755.416.533
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	71.248.877	130.431.848	79.320.484	149.767.137	280.036.243
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.958.182	23.311.379	5.111.070	27.863.479	36.475.565
B BELANJA DAERAH	11.020.034.194	12.448.638.938	13.936.249.170	15.472.921.040	18.841.822.771
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.652.345.883	7.325.033.676	8.824.140.413	9.028.547.267	9.810.169.567
1.1 Belanja Pegawai	5.395.586.792	5.897.710.220	6.824.110.017	6.793.698.750	6.621.826.554
1.2 Belanja Bunga	8.325.000	8.325.000	8.265.000	5.100.000	10.290.000
1.3 Belanja Subsidi	6.127.920	3.870.000	5.420.000	4.550.000	9.340.792
1.4 Belanja Hibah	274.918.632	318.140.301	517.643.029	326.246.208	752.668.658
1.5 Belanja Bantuan Sosial	86.506.692	67.984.107	62.666.043	52.106.611	85.260.498
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	276.242.047	337.940.887	401.513.984	464.554.522	614.647.632
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	592.823.537	671.811.187	987.161.313	1.363.375.476	1.696.591.439
1.8 Belanja Tidak Terduga	13.815.354	19.251.974	17.361.027	18.915.700	19.543.995
2 BELANJA LANGSUNG	4.367.688.311	5.123.605.262	5.112.108.757	6.444.373.773	9.031.653.205
2.1 Belanja Pegawai	298.217.409	248.135.093	299.007.129	318.739.510	422.575.431
2.2 Belanja Barang dan Jasa	1.979.102.679	2.556.767.548	2.620.405.931	3.196.192.006	4.590.147.898
2.3 Belanja Modal	2.090.368.225	2.318.702.621	2.192.695.697	2.929.442.256	4.018.929.875
C PEMBIAYAAN	818.789.988	988.296.112	215.632.438	896.827.023	1.754.870.890
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	998.019.191	1.063.972.551	957.931.118	1.147.802.199	1.863.386.760
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	924.799.768	1.057.959.657	952.293.224	1.140.712.636	1.480.408.525
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	65.817.423	0	0	0	317.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	59.913.672
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	62.894	0	664.563	664.563
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	62.894	0	0
1.8 Lainnya	7.402.000	5.950.000	5.575.000	6.425.000	5.400.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	179.229.203	75.676.439	139.964.727	250.975.176	108.515.869
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	10.300.000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	158.152.203	45.083.439	108.871.727	210.995.176	48.707.706
2.3 Pembayaran Pokok Utang	14.880.000	25.393.000	25.893.000	24.080.000	51.033.163
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	997.000	0	0	0	3.375.000
2.5 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.600.000	5.400.000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	693.703	0	101.663.033	0



Tabel 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2013 - 2017 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A PENDAPATAN DAERAH	11.594.914.803	13.191.952.471	14.654.841.029	16.470.143.429	17.783.197.464
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.485.482	4.842.700.555	5.377.762.614	6.086.850.948	7.303.473.416
1.1 Hasil Pajak Daerah	22.069.530	3.507.060.540	3.891.979.298	4.334.304.614	5.129.370.804
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.905.026	321.278.766	325.836.282	320.066.942	313.799.423
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.937.071	212.563.327	235.468.489	285.720.740	366.918.856
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.573.855	801.797.923	924.477.885	1.146.758.652	1.493.384.332
2 DANA PERIMBANGAN	517.834.703	5.838.330.818	5.881.930.984	7.831.945.296	7.801.295.966
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.511.707	270.573.611	219.858.842	321.745.524	305.819.359
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	450.919.726	5.202.034.053	5.249.585.922	5.916.618.568	5.814.778.940
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45.403.270	365.723.154	412.486.220	1.593.581.204	1.680.697.667
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	159.014.797	2.510.921.098	3.395.147.431	2.551.347.185	2.678.428.081
3.1 Pendapatan Hibah	0	81.107.783	344.369.417	397.423.724	212.068.921
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.699.593	1.045.604.285	1.277.011.636	1.181.264.543	1.036.784.569
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.517.727	1.267.642.986	1.695.952.320	629.197.701	514.947.985
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.797.477	92.750.569	65.078.981	167.248.456	691.233.541
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	23.815.476	12.735.077	176.212.762	223.393.065
B BELANJA DAERAH	718.538.444	12.668.009.935	14.189.147.619	16.533.539.583	17.986.825.133
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	416.035.004	7.624.550.751	8.637.940.756	9.340.713.622	9.799.040.663
1.1 Belanja Pegawai	353.148.286	5.996.682.408	6.339.563.403	6.700.407.599	6.163.221.219
1.2 Belanja Bunga	0	6.338.150	4.502.374	2.612.207	3.616.311
1.3 Belanja Subsidi	0	3.837.400	5.393.600	4.378.338	7.476.568
1.4 Belanja Hibah	14.529.650	403.129.406	496.207.517	437.080.198	967.798.194
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.109.038	66.967.581	45.932.545	57.018.294	118.214.663
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.528.288	380.099.373	456.919.401	560.004.843	686.129.737
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36.700.121	757.750.346	1.288.133.748	1.571.213.496	1.833.957.248
1.8 Belanja Tidak Terduga	19.622	9.746.088	1.288.168	7.998.647	18.626.723
2 BELANJA LANGSUNG	302.503.439	5.043.459.184	5.551.206.863	7.192.825.962	8.187.784.470
2.1 Belanja Pegawai	33.198.532	230.304.736	336.329.146	374.298.415	392.599.073
2.2 Belanja Barang dan Jasa	126.741.441	2.599.440.426	2.941.885.878	3.544.213.834	4.479.083.457
2.3 Belanja Modal	142.563.466	2.213.714.022	2.272.991.839	3.274.313.712	3.316.101.940
C PEMBIAYAAN	58.067.447	1.676.395.313	1.786.336.357	2.088.753.191	1.924.410.235
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.467.447	1.912.690.724	2.212.791.302	2.255.623.134	2.012.981.577
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	61.063.989	1.899.479.326	2.204.919.524	2.251.417.953	1.894.909.759
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	455.618	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	370.926	0	0	113.865.537
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	150.000	0	2.593.500	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	621.676	776.697	651.670	51.481
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	6.868.796	1.164.463	9.507	921.799
1.7 Lainnya	5.403.458	5.200.000	5.475.000	950.505	3.233.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.400.000	236.295.410	426.454.945	166.869.944	88.571.341
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	4.500.000	3.800.000	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	202.504.306	393.828.537	142.534.172	65.641.644
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	24.091.104	23.826.408	23.826.408	19.249.105
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.000.000	509.364	3.680.592
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEVAAN	84.863.986	2.236.787.121	2.252.029.767	2.025.357.036	1.720.782.566

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226

Telp: (0361) 2381, Fax: 23162

Email: bps5100@bps.go.id

Website: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7773



9 772477 177700 6